

FUNDAMENTALISME ISLAM TIMUR TENGAH:

Akar Teologi, Kritik Wacana dan Politisasi Agama



Abdurrahman Kasdi

Lahir di Pati, 25 Pebruari 1976. Alumni Universitas Al-Azhar Mesir dan Mantan Ketua PC LAKPESDAM-NU Mesir. Sekarang aktif sebagai redaktur Majalah PESANTREN dan sedang menempuh program Pascasarjana UI, jurusan Politik dan Hubungan Internasional Timur Tengah.

"Fundamentalisme Islam di satu sisi, bukanlah Islam per se dan, di sisi lain, dalam jangka panjang para fundamentalis Islam jauh lebih berbahaya sebagai ideolog-ideolog kekuasaan daripada sebagai ekstremis-ekstremis yang membunuh, menembak, dan melemparkan bom. (Bassam Tibi; 2000)

Agama Islam merupakan kepercayaan yang *open-minded*, inklusif, bukan ideologi politik yang intoleran, juga bukan agama yang memaksa manusia untuk memeluknya. Dengan sangat jelas al-Qur'an menyebutkan: *"Tidak ada paksaan dalam agama."*¹ Akan tetapi kaum fundamentalis menampikan agama yang menakutkan bagi kehidupan politik, keamanan dan stabilitas dunia. Hal ini karena fundamentalisme memiliki beberapa karakter, di antaranya: *Pertama*, fundamentalisme agama mempunyai agenda politisasi agama yang agresif dan dilakukan demi mencapai

tujuan-tujuannya. *Kedua*, fundamentalisme, baik Islam atau yang lain, merupakan bentuk superfisial dari terorisme atau ekstremisme.²

Karakter terorisme yang fundamentalistik menemukan momentumnya ketika penembakan brutal terhadap ratusan warga Muslim Palestina yang sedang melakukan shalat subuh di Masjid al-Khalil (Hebron), oleh ekstrim dan fundamentalis Yahudi pada hari Jumat 25 Pebruari 1994 dan menewaskan 63 orang; aksi bom bunuh diri yang menewaskan militer dan sipil yang tidak berdosa di wilayah Palestina; serangan "kamikaze"

¹Q.S. al-Baqarah, 2: 256.

²Bassam Tibi, *Ancaman Fundamentalisme Rajutan Islam Politik dan Kekacauan Dunia Baru*, Terj. Imron Rosyidi, dkk. (Yogyakarta: Tiara Wacana, November 2000), Hlm. X.

terhadap Gedung WTC dan Pentagon yang mengejutkan dunia dan peristiwa lain yang terekam dalam aksi kaum fundamentalis.

Fundamentalisme dalam kasus di atas, terkesan sebagai ancaman dan sering menebar konfrontasi. Menjadikan simbol-simbol agama demi menyukseskan target politik mereka. Sehingga, perlu dibedakan antara agama sebagai sebuah kepercayaan (*belief*) dan sistem budaya dengan agama sebagai alat untuk membangun legitimasi politik, bagi para penguasa dan oposisi politik dari sederetan gerakan fundamentalis.

Akar Teologi Fundamentalisme

Istilah fundamentalisme, secara etimologi berasal dari kata fundamen yang berarti dasar. Sedangkan secara terminologi, fundamentalisme adalah aliran pemikiran keagamaan yang cenderung menafsirkan teks-teks keagamaan secara *rigid* (kaku) dan literalis (tekstual).³ Menurut Mahmud Amin al-'Alim, pemikiran fundamentalisme telah kehilangan relevansinya, karena zaman selalu berubah dan problematika semakin kompleks. Perlu reinterpretasi terhadap teks-teks keagamaan dengan mengedepankan ijtihad, membongkar teks-teks yang kaku, dan mengutamakan masalah serta *maqâshid al-syari'ah*.⁴



Berbeda dengan Mahmud Amin al-'Alim, Bassam Tibi membidik aspek lain dari fundamentalisme. Menurutnya, fundamentalisme merupakan sebuah gejala ideologi yang muncul sebagai respon atas problem-problem globalisasi, fragmentasi dan benturan peradaban.⁵ Namun, dalam perkembangan selanjutnya agitasi fundamentalisme mengakibatkan kekacauan, bukan hanya di dunia Islam melainkan di seluruh dunia.

Sehingga bisa dimaklumi, jika pemaknaan istilah fundamentalisme dalam

³Dr. Mahmud Amin al-'Alim, "al-Fikr al-'Araby al-Mu'âshir baina al-Ushûliyah wa al-'Almâniyah", dalam *al-Ushûliyah al-Islâmiyah*, (Qadhâyâ Fikriyah Li an-Nasyr wa at-Tauzî', 1993), hlm.10.

⁴*Ibid*, hlm.11.

⁵Bassam Tibi, *Op.Cit*, hlm. 8.

realita telah mengalami distorsi (pembalikan) makna, cenderung menjadi istilah yang bias (berat sebelah), *pejoratif* (bersifat merendahkan) dan sering digunakan dengan konotasi makna yang cenderung ke arah negatif. Istilah ini menimbulkan suatu kesan tertentu, misalnya: ekstremisme, fanatisme, atau bahkan terorisme dalam mewujudkan dan mempertahankan keyakinan keagamaan. Mereka yang disebut kaum fundamentalis sering dikonotasikan sebagai tidak rasional, tidak moderat dan cenderung untuk melakukan tindakan kekerasan. Istilah fundamentalisme lebih terkesan kelompok separatis agama, yang kemudian dilengkapi dengan atribut-atribut negatif. Di antaranya bahwa pandangan mereka yang radikal, militan, berpikiran sempit (*narrow-minded*) dan cenderung memakai cara-cara kekerasan.

Pandangan ini kemudian dikembangkan oleh para pemikir fundamentalis dan selalu diasah, sehingga tampil sebagai ideologi yang memberi pengikutnya suatu manual tindakan. Pada akhirnya, mereka melawan arus dan berusaha mensakralkan kembali dunia yang dari hari ke hari semakin skeptis.⁶

Ada beberapa karakter yang menjadi *platform* gerakan kaum fundamentalisme, antara lain: *pertama*, mereka cenderung melakukan interpretasi literal terhadap teks-teks suci agama. Menolak pema-

haman kontekstual atas teks agama, karena pemahaman seperti ini dianggap akan mereduksi kesucian agama. *Kedua*, menolak pluralisme dan relativisme. Bagi kaum fundamentalis, pluralisme merupakan distorsi pemahaman terhadap ajaran agama. *Ketiga*, memonopoli kebenaran atas tafsir agama. Kaum fundamentalis biasanya cenderung menganggap dirinya sebagai pemegang otoritas penafsir agama yang paling absah dan paling benar, sehingga cenderung menganggap sesat kepada kelompok yang tidak seialiran dengan mereka. *Keempat*, gerakan fundamentalisme mempunyai korelasi dengan fanatisme, eksklusifisme, intoleran, radikalisme dan militanisme. Kaum fundamentalisme selalu mengambil bentuk perlawanan terhadap ancaman yang dipandang membahayakan eksistensi agama. Empat karakter di atas, menunjukkan bahwa setiap agama mempunyai potensi munculnya kaum fundamentalisme.

Secara global fundamentalisme bukan hanya masalah internal Islam, tetapi lebih merupakan masalah semua agama inklusif. Kaum fundamentalis Kristen menolak klaim-klaim ilmu biologi dan fisika tentang asal-muasal kehidupan. Di saat orang banyak berusaha keluar dari penjara masa lalu, kaum fundamentalis Yahudi malah lebih tertarik dan semakin asyik dengan belenggu masa lampau. Mereka bahkan

⁶Martin E. Marty R. Scot Appleby, "Conclusion: An Interim Report on a Hypothetical Family (Chicago dan London, 1991), hlm. 814. Dikutip oleh Karen Armstrong, hlm. xii.

selalu memposisikan diri berantagonis dengan Islam dan kaum muslimin.⁷ Kaum fundamentalis Islam juga demikian. Mereka bahkan sering melakukan terorisme yang menakutkan dunia.

Menurut Karen Armstrong, fundamentalisme tidak hanya terdapat pada agama monoteisme saja. Ada juga fundamentalis Budha, Hindu dan bahkan Kong Hu Cu, yang sama-sama menolak butir-butir nilai budaya liberal, saling berperang atas nama agama (Tuhan), dan berusaha membawa hal-hal yang sakral ke dalam urusan politik dan negara.⁸

Bila dilacak dari konteks historis, istilah fundamentalisme pada awalnya muncul sebagai upaya untuk memahami gejala perkembangan di lingkungan Kristen Protestan dan Katolik. Sebagaimana dalam *Encyclopaedia of the Social Sciences* (1996), yang memberikan keterangan pertamanya sebagai berikut:

“Fundamentalisme adalah sebuah nama tentang gerakan agresif dan konservatif di lingkungan Gereja Kristen Protestan di Amerika Serikat yang berkembang dalam dasawarsa sesudah Perang Dunia I. Gerakan ini tercetus terutama di lingkungan gereja-gereja Baptist, Disciple dan Persbyterian dan memperoleh dukungan dari kalangan lain pada kelompok kependetaan.”

Gerakan fundamentalisme lahir dalam situasi konflik antara budaya urban

dan budaya pedesaan dalam sejarah Amerika Serikat pada masa Perang Dunia I. Pemimpin yang populer pada waktu itu adalah seorang tokoh agraris, W.J. Bryan. Konflik tersebut muncul bersamaan dengan situasi depresi nilai-nilai agraris dalam proses industrialisasi dan urbanisasi di negeri itu. Istilah fundamentalisme ini kemudian dipopulerkan oleh kaum Protestan Amerika sebagai perlawanan terhadap kaum ‘liberal’ yang menurut mereka telah merusak keimanan Kristen.⁹

Fundamentalisme Kristen mempunyai paham tentang “*Supernaturalisme Konservatif*” yang melahirkan doktrin “lima butir fundamentalisme”, *Pertama*, kebenaran mutlak dan tidak adanya kesalahan pada kitab suci Injil (*Holy Bible*). *Kedua*, kelahiran Yesus dari Ibu Maria yang suci. *Ketiga*, penebusan dosa umat manusia oleh Yesus. *Keempat*, kebangkitan kembali Yesus secara jasmaniah yang turun ke bumi. Dan *Kelima*, Ketuhanan Yesus Kristus.

Sedangkan di kalangan Arab-Islam, fundamentalisme berkembang menjadi lahan subur setelah kekalahan militer Arab di tangan bangsa Israel pada perang Juni 1976. Bassam Tibi memberikan ilustrasi menarik tentang hal ini. Menurutnya, kegagalan itu telah mengantarkan dunia Arab dalam kubangan konflik yang berkepanjangan. Peristiwa ini juga

⁷Syaikh al-Azhar, Dr. Muhammad Sayyid Thantawi, *Banû Isrâ'îl fî al-Qur'ân wa As-Sunnah* (Kairo: Dâr as-Syuruq, cet. II, 2000), hlm. 150.

⁸Karen Armstrong, *Berperang Demi Tuhan*, terj. Satrio Wahono dkk. (Jakarta-Bandung: Kerjasama Serambi dengan Mizan, cet II, Oktober 2001), hlm. x.

⁹Karen Armstrong, *Ibid*, hlm x.

mendorong mereka membentuk tatanan dunia baru yang fundamentalistik.¹⁰ Hal ini bisa kita analisis dari gejala yang muncul di Afghanistan, Arab Saudi, Iran, Sudan dan negara-negara lain di Timur Tengah.

Kaum fundamentalisme Islam semakin mendapatkan tempat, setelah Ayatullah Khumaini, secara sensasional pada tahun 1979 menumbangkan kekuatan rezim Syah Iran. Khumaini, bahkan, berjanji akan mengeksport revolusinya itu ke negara-negara Islam dan seluruh dunia. Tak pelak lagi, negara-negara tertindas, khususnya wilayah jajahan Uni Soviet, menyambut baik proyek Khumaini. Ketika Menlu Iran, Dr. Ali Akbar Velayati mengunjungi enam negara bagian Uni Soviet pada Desember 1991, ribuan massa menyambut meriah dan meneriakkan slogan, "Selamat datang Velayati, Anda menabur kewangian Imam Khumaini."¹¹ Implikasi dari sikap ini, program 'glasnost' yang dipopulerkan Mikhail Gorbachev pun, berbuah demonstrasi anti-Kremlin besar-besaran yang terjadi di Baku, ibukota Republik Azerbaijan, pada tahun 1988.¹²

Kritik Wacana dan Gerakan Fundamentalisme Islam

Apa yang menarik bagi kita dari pemikiran fundamentalisme? *Pertama*, kaum fundamentalisme meniscayakan hubungan yang harmonis antara agama dan negara,¹³ terutama terbentuknya lembaga dan institusi yang berlabelkan Islam, seperti isu negara Islam, formalisasi syariat Islam, mempermasalahkan gender dan simbol-simbol ideologi keagamaan lainnya. Menurut al-Asymawi, selama ini kaum fundamentalis terjebak pada artifisialistik dan simbolistik, belum mencapai substansi yang esensial dari makna ajaran Islam.¹⁴

Klaim tentang negara Islam dan penerapan syariat Islam masih berkuat pada pemahaman masing-masing, sehingga antar negara yang saling mengklaim itu pun esensinya berbeda-beda ketika dibenturkan pada hal-hal yang aplikatif.¹⁵ Akhirnya, syariat Islam dilaksanakan secara simbolik oleh negara tertentu, dan ini hanya akan mengurangi ruang gerak syariat itu sendiri. Alih-alih dapat meraih nilai universal syariat,

¹⁰Bassam Tibi, *Op.Cit*, hlm xv.

¹¹*Editor*, edisi 11 Januari 1992.

¹²Majalah *The Middle East*, Edisi September 1989.

¹³Persepsi kaum fundamentalis tentang harmonisasi hubungan antara agama dan negara, tidak seluruhnya terealisasi. Justru konvergensi antara keduanya terkadang menimbulkan problem tersendiri, seperti perang antar-sesama/saudara muslim, yang diistilahkan oleh Muhammad 'Abied al-Jabiri sebagai *al-Hurûb al-Ahliyah*. Lihat Muhammad 'Abied al-Jabiri, *Addin wa ad-Daulah wa Tathbiq as-Syari'ah* (Markaz Dirâsah al-Wihdah al-'Arabiyah, 1996), hlm. 115.

¹⁴al-Asymawi, *Ushûl As-Syari'ah*, Madbûli As-Shaghîr, cet. IV, hlm. 22-23.

¹⁵Mahmud Ismail, *Op.Cit*, hlm. 11.

formalisasi syariat Islam justru menimbulkan pemahaman yang sempit. Misalnya, di Arab Saudi dalam hal pelarangan perempuan menyetir mobil, atau pelarangan warga Afganistan memutar kaset musik akibat keyakinan penguasa Taliban, bahwa musik haram. Sehingga menjadi pemandangan yang biasa jika satu negara terlalu ketat dalam menerapkan syariat Islam, sedangkan negara lain agak longgar, walaupun sama-sama mengklaim sebagai negara Islam yang menerapkan syariat Islam.

Kasus Sudan, Arab Saudi dan Afghanistan merupakan bukti konkret dari gagalnya kaum fundamentalisme yang mencoba memformalkan syariat Islam. Padahal, syariat Islam merupakan pranata yang progresif untuk menciptakan kesalahan sosial dan mewujudkan visi keadaban Islam.

Kedua, pandangan yang stigmatis terhadap Barat. Dalam *image* kaum fundamentalis, Barat tampil sebagai monster imperialis yang sewaktu-waktu mengancam akidah dan eksistensi mereka. Dialog Islam dan Barat selalu mengalami kebuntuan. Apalagi, mantan Sekretaris Jenderal (sekjen) NATO, Willy Claes mengeluarkan pernyataan yang reaksioner dan menyebut fundamentalisme sebagai ancaman utama terhadap peradaban

Barat.¹⁶

Dalam pandangan kaum fundamentalis Timur Tengah, Barat harus bertanggung jawab atas berdirinya negara Yahudi Israel, degradasi moral dan krisis di Timur Tengah. Oleh Karena itu, Hassan Hanafi mencoba untuk meletakkan posisi Barat pada tempatnya. Dalam wawancaranya dengan penulis, ia mengatakan:

"Saya akan memberikan stimulasi kesadaran Arab dengan memakai peradaban Barat, karena peradaban Barat dalam wacana kesadaran Arab akan menjadi pesaing terhadap *turâts* terdahulu yang tetap hidup dan tercipta asimilasi peradaban. Hanya saja saya ingin mengembalikan posisi Barat pada batasan-batasannya secara natural. Peradaban Barat merupakan fenomena historis sebagaimana peradaban-peradaban lain, termasuk juga peradaban kita".¹⁷

Ketiga, deklarasi perang terhadap paham sekuler. Kaum fundamentalis Islam berjuang keras untuk memerangi dan meruntuhkan tatanan yang sekuler tentang lembaga politik dan bermaksud menggantikannya dengan tatanan Tuhan, yang mereka sebut *hâkimiyyah Allâh*. Dalam blantika pemikiran Timur Tengah, sering terjadi benturan dan perebutan wacana pemikiran antara kaum fundamentalis, liberal dan sekuler. Tak asing lagi bagi kita, bagaimana munculnya

¹⁶Bassam Tibi, *Op.Cit*, hlm. 3.

¹⁷Abdurrahman Kasdi, *Membangun Peradaban Umat; Perspektif Sosial, Politik dan Humanisme dalam Islam* (Lakpesdam Cabang Mesir, Agustus 2001), hlm. 98. Sikap terhadap Barat secara representatif dijelaskan secara panjang lebar oleh Prof. Dr. Hassan Hanafi, dalam bukunya *Muqaddimah fi 'Ilmi al-Istighrâb*, yang diterjemahkan oleh Najib Bukhari dan diterbitkan oleh Paramadina dengan judul *Oksidentalisme: Sikap Kita terhadap Tradisi Barat* (Jakarta: Paramadina, Juli 2000).

diskursus pemikiran Thaha Husain, Ahmad Muhammad Khalafullah, Syaikh ad-Dzahabi, Faraq Faudah, Hassan Hanafi, dan belakangan Nashr Hamid Abu Zayd. Mereka melakukan perlawanan terhadap *satus quo* dan mendekonstruksi pemikiran klasik. Pembacaan terhadap teks yang mereka lakukan sebenarnya sangat fenomenal dan perlu mendapat respon dalam rangka memperkaya khazanah pemikiran Islam. Namun, yang mereka hadapi tidak lain dari *takfir* (pengkafiran), pemurtadan, dan bahkan dicabut hak kewarganegaraannya.

Fenomena ini semakin memperkuat analisis bahwa fundamentalisme Islam, di satu sisi bukanlah Islam *per se*. Sedangkan di sisi lain, bahwa dalam jangka panjang para fundamentalis Islam jauh lebih berbahaya, mewakili ideologi penguasa yang mendemonstrasikan ekstremis-ekstremis pembunuhan, memenggal leher dan melempar bom. Fundamentalisme, dengan demikian lebih sebagai *Weltanschauung*, atau pandangan dunia (*world-view*), yang berusaha membangun tatanannya sendiri, memisahkan masyarakat dari sisi humanitas seraya mengklaim pandangan mereka sebagai sesuatu yang berlaku universal.¹⁸

Kasus pengkafiran terhadap Thaha Husain, pembunuhan terhadap Faraq Faudah dan pengusiran terhadap Nashr Hamid Abu Zayd merupakan cermin buram dari sejarah diskursus pemikiran

keagamaan di Timur Tengah. Perebutan wacana yang terjadi hanyalah manifestasi dari penindasan keyakinan mayoritas, yang dianggap paling benar terhadap paham minoritas. Ibaratnya, hal ini merupakan ketegangan masyarakat antara tuntutan umum dan kreatifitas individu.

Membangun masyarakat inklusif memang banyak tantangan, sebagaimana menurut Karl Popper, membangun Islam inklusif juga memiliki tantangan, yaitu kaum fundamentalis.¹⁹ Mereka mengusung Islam eksklusif, dengan cara terorisme dan ekstrimisme, serta menyulut sentimen massa.

Kaum fundamentalis mengekspresikan gerakan moral dan politiknya melalui sentimen massa terhadap ideologi nasionalis dan sosialis. Bahkan sentimen massa ini akhirnya melembaga, baik formal maupun informal. Kita bisa mengamati gerakan fundamentalisme yang terbentang di kawasan Timur Tengah, seperti Ikhwanul Muslimin (Mesir), FIS (Aljazair), Refah (Turki), Jamaat Islami (Pakistan), Hizbut Tahrir (Yordania), Taliban (Afghanistan), Al-Mujahidin (Irak), Jam'iyah Ruhaniyah Mobarez (Iran), Hizbullah (Libanon), Hamas (Palestina), Gerakan Imam Mahdi (Arab Saudi), Hizb an-Nahdlah (Tunisia), al-Ikhwan (Suriah), National Islamic Front/NIF (Sudan), al-Haq (Yaman), Arab Revolutionary Brigades (Kuwait) dan Munadzdzamat al-Amal al-Islami (Bah-

¹⁸Bassam Tibi, *Op.Cit.*, hlm. xii.

¹⁹Dikutip oleh Bassam Tibi, *Ibid*, hlm. xviii.

rain).

Gerakan-gerakan fundamentalisme di Timur Tengah yang sering melegitimasi penggunaan kekerasan dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori. *Pertama*, negara-negara yang rezim pemerintahnya otoriter seperti Irak dan Suriah. Al-Mujahidin di Irak menentang kediktatoran Saddam Hussain, demikian halnya al-Ikhwan di Suriah yang menentang rezim Hafidz al-Asad.

Kedua, wilayah yang dijajah dan diduduki kekuatan asing, seperti di Palestina. Fundamentalisme di Palestina muncul sebagai reaksi atas kekerasan politik yang dilakukan Israel di daerah Palestina yang diduduki. Agresi dan terorisme negara yang dimainkan oleh Israel terhadap penduduk Palestina dan usaha mencaplok beberapa wilayah di Jalur Gaza, Tepi Barat, Dataran Tinggi Golan dan beberapa wilayah lain. Dalam logika Israel, teror dianggap dapat meredakan gejolak rakyat Palestina. Israel lupa bahwa pasti ada aksi berantai (*action-reaction chains*) jika teror dilakukan. Hal ini sudah merupakan hukum besi-teror, tidak ada teror yang dapat berjalan tanpa melahirkan teror balasan. Terbukti, seminggu setelah teror Israel di Tunis, teror balasan terhadap Israel pun segera terjadi. Serangan Israel secara besar-besaran terhadap Palestina hanya akan melegitimasi eksistensi kaum fundamentalisme

Palestina.

Ketiga, di negara yang kebijakan pemerintahannya dipandang terlalu memihak ke Barat seperti di Mesir. Munculnya Ikhwanul Muslimin di Mesir tidak lepas dari sentimen massa²⁰, menentang kebijakan pemerintah yang pro-Barat dan cenderung memarginalkan peran mereka. Presiden Husni Mubarak sadar akan kegagalan Anwar Sadat dalam merangkul kelompok militan Islam ini. Sehingga, ia mengeluarkan kebijakan mengizinkan kelompok Ikhwan berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi, politik dan mengekspresikan kritik mereka terhadap kebijakan pemerintah.

Tercatat mulai 1941 mereka aktif dalam pemilu nasional, jatuh bangun merebut kursi parlemen. Hanya satu komitmen yang ingin mereka perjuangkan, sebagaimana yang diungkapkan oleh salah seorang pemimpinnya, al-Faramawi, yaitu "mengapresiasikan ideologi dalam tindakan".²¹ Dalam pemilihan 1984, al-Ikhwan beraliansi dengan Partai Wafd baru dan memenangkan 12 kursi. Kemudian pada 1987, mereka membentuk "Aliansi Islam" dan berhasil merebut 32 kursi.

Sepanjang tahun 1989-1990, muncul gerakan demonstrasi yang menamakan dirinya "Penyelamatan dari Api Neraka", menghujat penguasa dan rakyat Mesir sebagai kafir. Di saat yang bersamaan al-

²⁰Hisham Sharabi, *Nepatriarchy: A Theory of Distorted Change in Arab Society* (New York: Oxford University Press, 1988), hlm.136.

²¹Komentor-komentor tentang al-Faramawi dimuat dalam *al-Anba'*, 3 Mei 1987.

Ikhwan memboikot pemerintah dan terjadi ketegangan sampai sekarang. Keduanya saling menuduh dan mengklaim. Di satu sisi al-Ikhwan menuduh pemerintah terlalu pro dengan Barat, sehingga kebijakannya banyak didekte oleh Eropa dan Amerika, sedangkan di sisi lain pemerintah menuduh al-Ikhwan berada di balik aksi serangan terhadap presiden.

Gerakan fundamentalisme di Tunis, MTI (*Mouvement de Tendance Islamique*) muncul karena sentimen massa terhadap kebijakan Habib Bourguiba yang menguntungkan Barat dan kaum sekuler, memarjinalkan agama dari masyarakat. Kelompok ini, oleh Habib selain disebut sebagai fundamentalis, juga teroris dukungan Iran. Namun Habib sendiri akhirnya bisa digulingkan oleh Zainal Abidin bin Ali yang didukung oleh kaum fundamentalis garis keras.

Peralihan *platform* politik Tunisia ke arah kebijakan garis keras yang dilakukan oleh para aktivis Islam tersebut dipengaruhi oleh beberapa peristiwa di Aljazair. Sejak lama, negara ini dikuasai oleh partai tunggal dan monolitik, di bawah rezim Presiden Chadli Bendjedid dari Front Pembebasan Nasional (FLN). Sejak kemerdekaannya, 1962 FLN menguasai setiap pemilu. Namun, pada 1990, Front



Islamic du Salut (FIS) memenangkan pemilu Aljazair dengan mengantongi 55%, sedangkan FLN hanya 32 %.²² Hal ini menunjukkan bahwa FIS lebih mengakar di kalangan masyarakat Aljazair.

Namun FIS ternyata memanfaatkan demokrasi untuk 'membunuh' demokrasi, karena menurut mereka demokrasi bertentangan dengan Islam.²³ Bahkan dalam beberapa kasus, FIS terlibat aksi kekerasan terhadap musuh-musuhnya. Pada Desember 1993, belasan warga asing dibunuh secara brutal. Di saat yang hampir bersamaan mereka juga melakukan serangan yang memakan korban warga sipil.

Pemaparan di atas menegaskan bahwa fundamentalisme dalam satu sisi

²²The Middle East, edisi bulan Juli 1990. Kemenangan FIS ini menjadikannya partai Islam pertama yang sukses di panggung politik Arab dan Afrika Utara, serta yang kedua untuk seluruh kawasan Timur Tengah setelah Partai Republik Islam di Iran, akhir tahun 1979 dan awal tahun 1980.

²³Pernyataan ini bisa kita amati dari kampanye Ali Benhadj yang mengatakan bahwa demokrasi tidak sesuai dengan Islam. Lihat dalam M. Riza Sihbudi, dkk, *Konflik dan Diplomasi di Timur Tengah* (Bandung: PT Eresco, 1993), Hlm. 75.

sebagai ideologi, sebagaimana yang dikampanyekan oleh: Sayyid Quthb (Mesir) dan Syaikh Fadlallah Nuri (Iran). Namun, di sisi lain fundamentalisme tampil sebagai gerakan, seperti didemonstrasikan oleh: Rasyid al-Ghannoushi dan Abdul Fattah Mourou (Tunisia) serta Syaikh Abbasi Madani dan Ali Benhadj (Aljazair).

Sebagai ideologi, fundamentalisme akan terbentur dengan problem epistemologi, khususnya mengenai demokrasi, egaliter, gender, HAM dan isu lainnya. Sayyid Quthb misalnya, ia sangat keras menentang setiap gagasan mengenai kedaulatan rakyat. Menurutnya, hal itu bertentangan dengan kekuasaan Tuhan yang menguasai manusia dalam setiap pengertian, bentuk, sistem dan kondisi. Pendapat ini diperkuat oleh Syaikh Fadlallah Nuri. Menurutnya, inti dari gagasan demokrasi, yakni kesamaan dan kedudukan semua warga negara, sangat mustahil diterapkan dalam Islam.

Sedangkan sebagai gerakan, kaum fundamentalis selalu tersandung masalah, karena mereka lebih dikenal sebagai teroris atau ekstremis. Departemen Luar Negeri (Deplu) AS, setiap tahun mengeluarkan laporan tentang kekerasan yang dilakukan oleh kaum terorisme dan fundamentalisme, atau negara yang mensponsori terorisme. Laporan Deplu yang tercatat April 1993, berjudul *Patterns of Global Terrorism 1992*, memasukkan

Kuba, Iran, Irak, Libya, Korea Utara dan Suriah ke dalam "daftar negara sponsor terorisme." Kemudian, di tengah kampanye memerangi terorisme pasca runtuhnya gedung WTC dan Pentagon, 11 Spetember 2001 kemarin, Presiden Bush mengumumkan negara-negara "poros setan" yang terdiri dari Iran, Irak, Korea, Libya, dan Suriah. Dari sederetan negara-negara itu, kita bisa melihat bahwa mayoritas adalah negara-negara Timur Tengah.

Neo-fundamentalisme Islam dan Politisasi Agama

Persoalan legitimasi negara dalam peta politik Timur Tengah, akan berujung pada visi yang disebut "imajinasi politik Islam." Ini sering ditemukan dalam pernyataan politik mereka, seperti "dalam Islam tidak ada pemisahan antara politik dan agama." Sejak tahun 1930-an, Hassan al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin di Mesir, dan Abu al-A'la al-Maududi, pendiri partai Jamaat Islami membangun wacana dan gerakan pemikiran dengan mendefinisikan Islam sebagai sistem politik, mengikuti ideologi-ideologi abad ke-20.²⁴

Memang, kaum fundamentalis selalu memainkan kartu integrasi politik untuk membangkitkan masyarakat. Sasaran merebut kekuasaan, selalu mewarnai gerakan-gerakan FIS di Aljazair, atau Hizb Islami di Afghanistan dan tidak diperbolehkannya perempuan memainkan

²⁴Olivier Roy, *Gagalnya Islam Politik*, terj. Harimurti dan Qamaruddin (Serambi, tanpa tahun), hlm.xix.

peran dalam kehidupan politik. Ada tiga strategi yang dimainkan oleh kaum neo-fundamentalisme, sebagaimana dicatat oleh Olivier Roy.²⁵ Keikutsertaan pada kehidupan politik resmi; keterlibatan baru di lingkup sosial, baik di tataran moral, adat istiadat maupun perekonomian; serta pembentukan kelompok-kelompok sparatis –baik gerakan keagamaan yang ultra kolot maupun kelompok teroris.

Untuk menghilangkan persepsi tentang “ancaman Islam”, perlu penegasan di sini bahwa Islam sebagai agama bukanlah ancaman, tetapi fundamentalisme Islam itulah yang merupakan ancaman. Islam sebagai sebuah agama dan peradaban berbeda sekali dengan Islam sebagai ideologi politik karena yang terakhir ini justru akan mengurangi peran agama. Padahal, menurut Sa'id al-Asymawi, Islam sebagai agama, tampak universal dan humanis. Sedangkan sebagai ideologi politik, ia akan terpenjara dalam wilayah yang sempit, terbatas, lokal, temporal dan sektarian.²⁶ Politisasi agama gagal memahami realita masyarakat Timur Tengah.

Kenapa politisasi agama gagal? *Pertama*, politisasi agama tidak berhasil mengubah panorama politik Timur Tengah secara signifikan. Islam politik

tidak “lulus ujian” kekuasaan. Di awal tahun 1990-an, rezim penguasa masih tetap bercokol, sementara Perang Teluk justru semakin memantapkan hegemoni AS di wilayah Timur Tengah.

Kedua, politisasi agama gagal secara historis. Baik Iran, Aljazair, Sudan maupun Afghanistan belum mampu mewujudkan sebuah tatanan alternatif. Kegagalan ini bukan berarti partai-partai –seperti FIS dan lainnya- tidak meraih kekuasaan, melainkan partai-partai ini terbentur dengan problem epistemologis dan praksis. Bagi orang kaya, model negara islami adalah Arab Saudi (yang dimanifestasikan melalui pajak plus syariat). Sedangkan bagi kaum miskin adalah Afghanistan, Sudan dan Pakistan (pengangguran plus syariat).

Politisasi agama meniscayakan adanya formalisasi syariat Islam,²⁷ karena syariat mempunyai relevansi yang signifikan berkenaan dengan kekuasaan. Syariat memiliki dua ciri: otonomi dan ketidaklengkapannya.²⁸ Syariat bergantung pada negara, hukum aktual, hukum positif, dan keputusan politik manapun. Dengan demikian, syariat menciptakan ruang yang selaras dengan ruang politik dan kekuasaan.²⁹

²⁵Olivier Roy, *Ibid*, hlm. 98.

²⁶Menempatkan Islam sebagai ideologi politik, berarti mempersempit ruang gerak yang luas, sebagaimana ide formalisasi syariat Islam. Muhammad Sa'id al-Asymawi, *al-Islâm al-Siyâsi*, (Kairo: Madbuli al-Shaghir, 1996), hlm. 17.

²⁷Dr. Saifuddin 'Abdul Fattah Isma'il, *Fi an-Nadzriyyah As-Siyasiyah Min Mandzûr Islâmi* (Kairo: IIT, cet. I, 1998), hlm. 423.

²⁸Olivier, *Op.Cit*, hlm. 11

²⁹Muhammad 'Abied al-Jabiri, *Addîn wa ad-Daulah wa Tathbiq as-Syarî'ah* (Markaz Dirâsah al-Wihdah al-'Arabiyah, 1996), hlm. 117.

Fundamentalisme, Krisis Negara-Bangsa dan Pan-Arabisme

Kekuatan politik luar negeri kaum fundamentalisme sengaja diarahkan sebagai 'pemberontakan', menggugat dominasi Barat. Misi pemberontakan ini dimulai dengan melakukan perlawanan sistem negara-bangsa domestik yang diciptakan oleh Eropa. Sistem yang menurut Anthony Giddens, ditopang oleh dua proses yang bertanggung jawab menciptakan perubahan-perubahan luar biasa, yaitu: konsolidasi global kapitalisme industri dan pengaruh global negara-bangsa.³⁰

Fundamentalisme agama menjadi tantangan besar bagi negara-bangsa, yang mempunyai misi membentuk *nation-building* non-etnis, non-sektarian dan inklusif. Penolakan kaum fundamentalisme terhadap konsep negara-bangsa, bukan hanya karena ia merupakan solusi yang diimpor (*al-hulûl al-Mustauradah*),³¹ sebagaimana yang diungkapkan oleh Yusuf al-Qardlawi, tetapi juga karena lebih mencerminkan *prototype* negara sekuler,³² yang tidak mengakar di wilayah mereka. Konsep ini, menurut mereka bertentangan dengan jargon politik Islam, formalisasi syariat Islam, konsep *syurâ* (sebagai

tandingan demokrasi) dan hukum keadilan Tuhan. Jargon yang mereka usahakan untuk merealisasikan pandangan-pandangan teosentris.

Berbeda dengan kedaulatan negara-bangsa, di mana pemerintahan berada di tangan rakyat, kaum fundamentalis membangun kedaulatan Tuhan (*hâkimiyah Allâh*), manusia hanya menjalankan kehendak-Nya. Karena itu, prinsip subjektivitas (*das subjektivitäts prinzip*, Habermas) yang memunculkan diskursus filosofis modern, merupakan *bid'ah* bagi para fundamentalis. Politisasi fundamentalis tentang visi teosentris Islam yang tidak terbatas ini, menolak ide tentang manusia sebagai jiwa yang bebas, menentukan kehendaknya sendiri. Jadi, gerakan-gerakan fundamentalis berupaya menggantikan negara-bangsa dengan tatanan Tuhan, dimana *daulah qaumiyah* (negara-bangsa) harus diganti dengan *daulah Islâmiyah* (negara Islam).³³

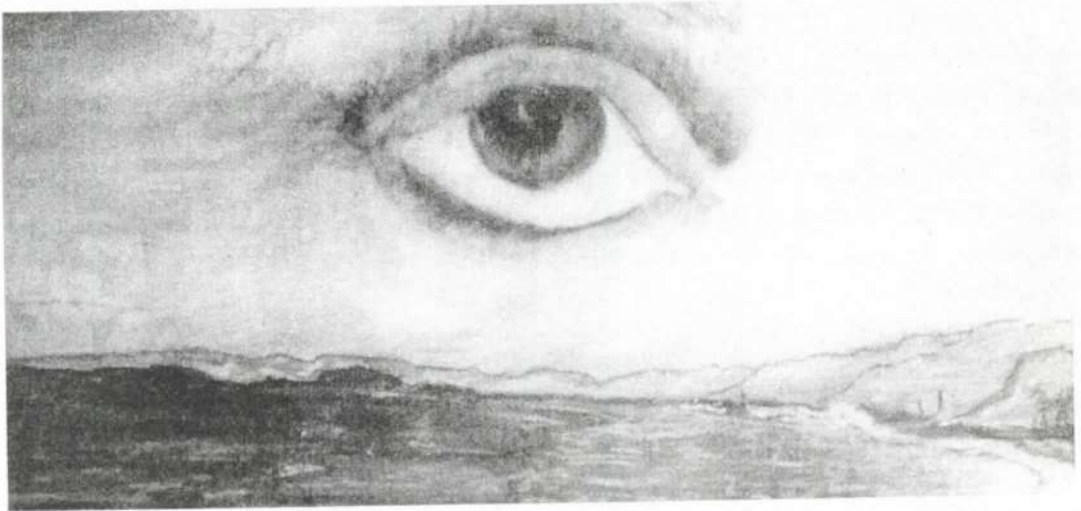
Namun, pandangan kaum fundamentalis yang terangkai dalam klaim universalitas peradaban Islam, ternyata tidak mampu menggerakkan proses globalisasi dari desain yang dimilikinya. Bahkan masalah-masalah peradaban Islam ter subordinasi pada konflik global yang

³⁰Anthony Giddens, *The Nation-State and Violence* (Berkeley: University of California Press, 1987), hlm. 255. Lihat juga dalam Bassam Tibi, hlm. 10.

³¹Yusuf al-Qardlawi, *al-Hulûl al-Mustauradah Waqâif Janât 'ala Ummatina* (Beirut: Muassasah a-Risâlah, 1980), hlm 49 dan 307.

³²Bassam Tibi, *Arab Nationalism: Between Islam and Nation-State*, hlm. 205.

³³Tentang ide *daulah Islamiyah*, lihat buku Yusuf al-Qardlawi, *Min Fiqh ad-Daulah fi al-Islâm* (Kairo: Dâr As-Syuruq, 1995) dan Muhammad Salim 'Awwa, *Fi an-Nidzâm as-Siyâsi li ad-Daulah al-Islâmiyah* (Kairo: Maktabah al-Mishri, 1983).



terjadi di kalangan mereka. Problem etnisitas, gender dan eksistensi non-muslim merupakan masalah yang serius dalam sistem politik kaum fundamentalis. Belum lagi problem *civil society*, yang lebih menekankan pada kekuatan masyarakat sipil sebagai ekspresi identitas dan loyalitas politik rakyat yang ada dalam negara.

Konflik negara-bangsa dan fundamentalis di Timur Tengah juga dipengaruhi oleh problem pembacaan terhadap fenomena di atas. Bahkan, mereka gagal membawa agama untuk membangkitkan keterpurukan peradaban Islam di akhir abad ini. Sebagaimana disinyalir oleh Leslie Lipson, bahwa faktor penyebab utamanya adalah: meratanya perpecahan yang akut dalam masyarakat Islam, yang berasal dari tribalisme dan ganasnya sektarianisme agama.³⁴ Kaum fundamentalisme telah memberikan

kontribusi terhadap panasnya eskalasi konflik dan meningkatnya krisis di negara-negara Timur Tengah.

Konflik internal yang tidak dapat dihindari, ibarat litani yang tiada bertepi. Di Afganistan, fragmentasi etnis menu-runkan kemampuan para fundamentalis Islam, sementara di Sudan dan Iran kaum fundamentalis justru berada dalam kekuasaan. Di Aljazair, panji-panji fundamentalis menebarkan slogan "*al-Jazâ'ir 'Arabiyyah wa Islâm dînuhâ*" (Aljazair adalah negara Arab dan Islam adalah agamanya). Kaum muslim Barbar non-Arab memahami slogan ini sebagai pernyataan perang terhadapnya. Di Irak meletus ketegangan antara penguasa etnis Sunni dari klan Takrit dan Kurdi di satu sisi dan Syi'ah di sisi lain. Konflik juga terjadi antara mayoritas Sunni dan kaum Alawi di Syiria.

³⁴Leslie Lipson, *The Ethical Crises of Civilization: Moral Meltdown or Advance?* (Newbury and London: Sage, 1993), hlm. 278, hlm. 216.

Analisis Leslie Lipson ini diperkuat oleh Michael Hudson. Ia menduga bahwa pusat identitas bangsa Arab terletak pada dimensi bahasa, budaya dan agama, yakni Islam. Islam di Timur Tengah mayoritas adalah Sunni. Sehingga dengan batasan ini, muslim Sunni non-Arab, seperti suku Kurdi dan Barbar serta muslim Arab non-Sunni, seperti kaum Alawi, Druze dan beberapa cabang Islam Syi'ah, dianggap sebagai minoritas dalam arti kelompok solidaritas komunal.

Selain ketegangan internal, problem politik Timur Tengah juga merambah pada konflik eksternal, antar negara-negara di Timur Tengah. Irak mempunyai beban sejarah dengan Iran, sewaktu Saddam menandatangani perjanjian dengan Syah Iran tahun 1975, dengan menyerahkan "*Garis Demarkasi Shatt al-Arab*" ke tangan Iran. Namun, tiba-tiba, Irak dengan komando Saddam melakukan agresi ke Iran yang dimulai pada 9 september 1980, ketika Iran lagi asyik melakukan konsolidasi setelah 'revolusi Islam.'

Irak juga mempunyai permasalahan dengan Kuwait, mengenai daerah Kuwait yang diklaim oleh Irak sebagai wilayahnya. Mesir mempunyai potensi konflik dengan Sudan. Di satu sisi, pemerintah Sudan menuduh bahwa Mesir adalah dalang di balik pemberontakan di daerah

Sudan Selatan. Sementara Mesir menuduh pemerintah Sudan telah merekayasa penembakan Husni Mubarak, Presiden Mesir, dalam perjalanan Mesir-Sudan. Belum lagi konflik Palestina-Arab dengan Israel yang tak pernah diketahui kapan berhentinya.

Dari tiga kali peperangan besar Israel dengan Arab (1948, 1967 dan 1973), wilayah pendudukan Israel atas wilayah-wilayah Arab semakin bertambah saja. Sebab, dalam peperangan tersebut negara Arab selalu kalah menghadapi Israel yang dibantu AS. Dalam perang 1948 misalnya, negara Arab dipermalukan oleh Israel.³⁵ Menyusul 1967, seluruh daerah Palestina seperti West Bank, termasuk Yerusalem Timur dan Gaza, diduduki Israel. Bahkan juga Sinai (daerah Mesir), dan Dataran Tinggi Golan (daerah Suriah) jatuh pula ke tangan Israel.

Melihat konflik yang berkepanjangan itu, terbetik keinginan untuk menggalang kekuatan di bawah satu payung organisasi. Maka berdirilah Pan-Arabisme. Terbentuknya Pan-Arabisme, lebih merupakan kesadaran politik yang *genuin*, menolak intervensi asing dan melintasi batas agama. Pencetusnya sendiri, Abdurrahman Al-Kawakibi (1849-1903) misalnya, selain mengecam despotisme Utsmani, juga mengemukakan sejumlah kelebihan-kelebihan bangsa Arab untuk menjadi

³⁵George Lenezowski, *Timur Tengah di Tengah Kancah Dunia*, terj. Asgar Bixby (Bandung: Sinar Baru Al-Gesindo, 1993), hlm. 257.

penguasa negara Islam dunia. Menurut, Sultan Utsmani telah merampas kekhalifahan dari Bangsa Arab.³⁶ Karena itulah Dinasti Utsmani tidak pantas menjadi penguasa di dunia muslim. Singkatnya, kekhalifahan harus dipegang oleh orang Arab.

Lebih tegas lagi Negib Azoury (1906) menggagaskan suatu Arab Empire dengan batas-batas alam seperti Terusan Suez, Lembah Eufarat dan Tigris, Lautan India dan Lautan Tengah. Bahkan, ia menuntut pemisahan Islam dan politik untuk meredam gejolak disintegrasi dan separatisme wilayah Arab dari Turki. Dalam identitas kolektif yang supra-nasional dan super-ordinat ini, ternyata terdapat identitas yang didukung oleh eksistensi negara-bangsa. Namun lagi-lagi mereka juga terbentur dengan problem etnisitas, dengan mengedepankan Arabismenya.

Pan-Arabisme yang direpresentasikan oleh organisasi Liga Arab mempunyai

missi, bukan hanya untuk menyatukan negara-negara Arab. lebih dari itu, ia menjadi media dalam membangun peradaban Arab. Peradaban yang oleh Muhammad 'Abied al-Jabiri, disebut sebagai embrio peradaban Islam. Pada dasarnya keduanya mempunyai agenda yang sama, mencitrakan Arab, Timur Tengah dan dunia Islam sebagai peradaban alternatif, damai dan inklusif.³⁷ Menepis isu tentang benturan peradaban yang memposisikan Islam sebagai penghalang Barat.

Karena, pada saat "benturan peradaban" menghiasi anti tesis beberapa kalangan termasuk Samuel Huntington, peradaban Islam yang *hanîf* justru mengambil peran strategis, memprakarsai perdamaian dunia dengan mengakomodir antar-peradaban berdasarkan saling menghormati, egaliter dan saling mengakui. ❖

³⁶Abbas Mahmud al-'Aqqad, *Arrahâlah 'Abdurrahman al-kawâkibi* (Kairo: Dâr Nahdhah Mishr li at-Tabâah wa an-Nasyr, 1986), hlm. 65-67.

³⁷Muhammad 'Abied al-Jabiri mengajukan metode membangun peradaban Arab dengan melalui kritik wacana, seperti dalam "Trilogi Kritik Nalar Arab": *Takwîn al-'Aql al-'Araby* (Konstruksi Nalar Arab), *Bunyah al-'Aql al-'Arabi* (Struktur Nalar Arab) dan *al-'Aql as-Siyâsi al-'Arabi* (Nalar Politik Arab). Setelah trilogi ini ia kemudian menyusun buku keempatnya yang berjudul: *Al-'Aql al-Akhlâqi al-'Arabi*.